



Kepemimpinan Transformasional Puan Maharani Dalam Konteks Politik Indonesia Kontemporer

Transformational Leadership Of Puan Maharani In The Context Of Contemporary Indonesian Politics

Bunga frenandes¹, clara auliana², Daniel Arief Hendrawan³, Yulia Hanoselina⁴, Rizki Syafril⁵

Ilmu administrasi Negara, Universitas Negeri Padang

Email : bungafrenandes087@gmail.com, yuliahanoselina@fis.unp.ac.id, rizkysyafril@fis.unp.ac.id

Article Info

Article history :

Received : 17-06-2025

Revised : 18-06-2025

Accepted : 20-06-2025

Published : 23-06-2025

Abstract

This research examines Puan Maharani's leadership style as Speaker of the House of Representatives with a focus on the transformational approach she has adopted in the Indonesian political context. Using a qualitative analysis of policies, public statements, and legislative initiatives during her tenure, the study identifies four key elements: a commitment to institutional transparency, strengthening the role of women in politics, an inclusive approach to decision-making, and the ability to build consensus across factions. The analysis shows that her leadership reflected a combination of traditional values with modern approaches to legislative governance. This research contributes to the literature on political leadership in developing countries by highlighting how influential female political figures create spaces for dialog and collaboration in evolving democratic systems. The implications of these findings are relevant for the understanding of the evolution of political leadership in Indonesia and provide a valuable perspective on gender dynamics in the power structure of national politics.

Keywords: Puan Maharani, leadership model, transformational leadership.

Abstrak

Penelitian ini mengkaji gaya kepemimpinan Puan Maharani sebagai Ketua DPR RI dengan fokus pada pendekatan transformasional yang diterapkannya dalam konteks politik Indonesia. Menggunakan metodologi analisis kualitatif terhadap kebijakan, pernyataan publik, dan inisiatif legislatif selama masa kepemimpinannya, studi ini mengidentifikasi empat elemen kunci: komitmen terhadap transparansi kelembagaan, penguatan peran perempuan dalam politik, pendekatan inklusif dalam pengambilan keputusan, dan kemampuan membangun konsensus lintas fraksi. Hasil analisis menunjukkan bahwa kepemimpinannya mencerminkan kombinasi nilai-nilai tradisional dengan pendekatan modern dalam tata kelola legislatif. Penelitian ini berkontribusi pada literatur kepemimpinan politik di negara berkembang dengan menyoroti bagaimana figur politik perempuan berpengaruh menciptakan ruang dialog dan kolaborasi dalam sistem demokrasi yang terus berkembang. Implikasi temuan ini relevan untuk pemahaman tentang evolusi kepemimpinan politik di Indonesia dan memberikan perspektif berharga tentang dinamika gender dalam struktur kekuasaan politik nasional.

Kata Kunci: Puan Maharani, model kepemimpinan, kepemimpinan transformasional



PENDAHULUAN

Kepemimpinan merupakan sikap dalam mengatur dan mempengaruhi seseorang agar dapat tercapai sebuah tujuan bersama. Peranan pemimpin dalam sebuah negara sangat penting, diibaratkan sebuah kapal yang sedang berlayar dibutuhkan seorang kapten yang mengendalikan jalannya kapal. Dan tanpa adanya kapten maka sebuah kapal akan berjalan tanpa arah, bahkan akan hancur dan tenggelam. Seorang pemimpin bisa berasal dari segala golongan baik dari golongan tua, muda, pria, ataupun seorang wanita. Dalam sejarah Negara Indonesia ini tercatat sudah memiliki tujuh kepala negara, namun hanya ada satu sosok perempuan yang menjadi pemimpin negara, hal ini menunjukkan bahwa masih minim peranan wanita dalam dunia politik dan kepemimpinan. Namun kepemimpinan oleh seorang perempuan di Indonesia bukanlah hal yang baru, hal ini dibuktikan dengan masa kepemimpinan presiden ke-5 yaitu Bu Megawati Soekarnoputri yang merupakan presiden perempuan pertama di Indonesia. Dan putrinya yaitu Puan Maharani Naksharta Kusyala, yang telah mencetak sejarah sebagai perempuan pertama yang menjabat sebagai ketua DPR. Dua sosok tersebut bisa mematahkan pendapat bahwa pemimpin harus seorang lelaki, sosok perempuan juga bisa menjadi seorang pemimpin, dan dibawah kepemimpinan Puan Maharani kinerja DPR RI dapat berkembang menjadi jauh lebih baik. Kepemimpinan politik di Indonesia telah mengalami transformasi signifikan dalam dua dekade terakhir sejak era reformasi. Salah satu perkembangan penting adalah meningkatnya keterlibatan perempuan dalam posisi-posisi strategis di pemerintahan. Dalam konteks ini, kehadiran Puan Maharani sebagai Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) menjadi fenomena yang menarik untuk dikaji, mengingat posisinya sebagai perempuan pertama yang memimpin lembaga legislatif tertinggi di Indonesia.

Kepemimpinan transformasional telah menjadi paradigma utama dalam studi politik kontemporer, terutama di negara berkembang seperti Indonesia yang menghadapi tantangan kompleks dalam konsolidasi demokrasi. Penelitian ini mengkaji secara mendalam model kepemimpinan Puan Maharani sebagai Ketua DPR RI, dengan fokus pada integrasi nilai-nilai tradisional Indonesia (seperti musyawarah mufakat dan kebhinekaan) dengan prinsip kepemimpinan transformasional modern. Studi oleh Frenandes et al. (2024) menegaskan bahwa kepemimpinan Puan Maharani tidak hanya mengadopsi teori Barat, tetapi juga mengakomodasi konteks sosio-kultural Indonesia, sehingga menciptakan model hibrida yang unik.

Penelitian tentang kepemimpinan politik perempuan di Indonesia masih relatif terbatas, terutama yang berfokus pada analisis mendalam terhadap gaya kepemimpinan dan dampaknya pada institusi yang dipimpin. Studi ini bertujuan mengisi kesenjangan tersebut dengan menganalisis karakteristik kepemimpinan transformasional yang ditunjukkan oleh Puan Maharani dalam menjalankan tugasnya sebagai Ketua DPR RI. Sebagai perempuan pertama yang memimpin DPR RI, Puan Maharani menghadapi tantangan ganda: membangun legitimasi di institusi yang didominasi laki-laki sekaligus mentransformasi tata kelola legislatif agar lebih transparan dan responsif. Temuan Bass dan Riggio (2006) tentang empat pilar kepemimpinan transformasional (idealized influence, inspirational motivation, intellectual stimulation, individualized



consideration) menjadi kerangka analisis utama, dengan modifikasi kontekstual sesuai realitas politik Indonesia. Kepemimpinan transformasional, sebagaimana dikemukakan oleh Bass dan Avolio (1994), mencakup kemampuan pemimpin untuk menginspirasi pengikutnya, membangun visi bersama, dan mendorong perubahan positif dalam organisasi. Konsep ini menjadi kerangka analisis yang relevan untuk memahami bagaimana Puan Maharani mengelola dinamika politik yang kompleks di parlemen Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menganalisis berbagai sumber data termasuk kebijakan yang diinisiasi, pernyataan publik, dan laporan media mengenai kepemimpinan Puan Maharani. Fokus analisis meliputi empat dimensi utama: upaya meningkatkan transparansi kelembagaan, inisiatif penguatan peran perempuan dalam politik, pendekatan inklusif dalam pengambilan keputusan, serta strategi membangun konsensus di antara berbagai fraksi politik di DPR

Signifikansi penelitian ini terletak pada kontribusinya terhadap pemahaman tentang evolusi kepemimpinan politik di Indonesia, khususnya dalam konteks representasi perempuan pada posisi kepemimpinan strategis. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan wawasan berharga bagi pengembangan teori kepemimpinan politik dalam demokrasi yang sedang berkembang, serta implikasinya terhadap pembangunan institusi demokrasi yang lebih inklusif dan representatif di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Puan Maharani, sebagai salah satu tokoh penting dalam politik Indonesia, telah menunjukkan berbagai aspek positif dalam kepemimpinannya yang patut dicontoh. Salah satu hal yang paling menonjol adalah pendekatannya yang inklusif dalam pengambilan keputusan. Dalam setiap kebijakan yang diusulkan, Puan selalu berusaha untuk melibatkan berbagai elemen masyarakat, memastikan bahwa suara rakyat, terutama dari kelompok yang terpinggirkan, dapat didengar dan diperhatikan. Pendekatan ini tidak hanya menciptakan rasa memiliki di kalangan masyarakat, tetapi juga meningkatkan legitimasi dari setiap kebijakan yang diambil.

Puan Maharani berhasil mengombinasikan prinsip musyawarah mufakat dengan pendekatan data-driven dalam proses legislasi. Misalnya, dalam penyusunan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (2023), ia mengadakan konsultasi publik daring yang melibatkan 15.000 partisipan dari 34 provinsi, sekaligus merujuk pada best practices internasional dari ILO Convention No. 189 (Frenandes et al., 2024). Pendekatan ini memperkuat legitimasi kebijakan dan mengurangi resistensi politik.

Implementasi Legislative Tracking System (LTS) oleh Puan Maharani memungkinkan publik memantau real-time progres 78 RUU selama periode 2020-2024. Sistem ini mengurangi legislative lag dari rata-rata 18 bulan menjadi 9 bulan (Sari et al., 2023). Inovasi ini selaras dengan



temuan Rahmawati dan Setiawan (2024) bahwa digitalisasi proses legislasi meningkatkan akuntabilitas sebesar 40%.

Puan Maharani mendirikan Forum Legislator Perempuan Nusantara (FLPN) pada 2022, yang beranggotakan 118 legislator perempuan dari 24 partai. Forum ini berhasil meningkatkan partisipasi perempuan dalam penyusunan RUU dari 12% (2019) menjadi 34% (2024), khususnya di bidang kesehatan reproduksi dan perlindungan anak (Astuti & Rachmawati, 2024).

Hasil atau Pencapaian pada kepemimpinan Puan Maharani

1. Integrasi Nilai Lokal dan Modernitas : Puan Maharani berhasil mengombinasikan prinsip musyawarah mufakat dengan pendekatan data-driven dalam proses legislasi. Misalnya, dalam penyusunan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (2023), ia mengadakan konsultasi publik daring yang melibatkan 15.000 partisipan dari 34 provinsi, sekaligus merujuk pada best practices internasional dari ILO Convention No. 189 (Frenandes et al., 2024). Pendekatan ini memperkuat legitimasi kebijakan dan mengurangi resistensi politik.
2. Inovasi Teknologi untuk Transparansi : Implementasi Legislative Tracking System (LTS) oleh Puan Maharani memungkinkan publik memantau real-time progres 78 RUU selama periode 2020-2024. Sistem ini mengurangi legislative lag dari rata-rata 18 bulan menjadi 9 bulan (Sari et al., 2023). Inovasi ini selaras dengan temuan Rahmawati dan Setiawan (2024) bahwa digitalisasi proses legislasi meningkatkan akuntabilitas sebesar 40%.
3. Penguatan Jejaring Perempuan Legislator : Puan Maharani mendirikan Forum Legislator Perempuan Nusantara (FLPN) pada 2022, yang beranggotakan 118 legislator perempuan dari 24 partai. Forum ini berhasil meningkatkan partisipasi perempuan dalam penyusunan RUU dari 12% (2019) menjadi 34% (2024), khususnya di bidang kesehatan reproduksi dan perlindungan anak (Astuti & Rachmawati, 2024).

Pembahasan

Kepemimpinan merupakan salah satu faktor yang sangat menentukan dalam pengembangan dan kemajuan dari sebuah organisasi. Dengan adanya kepemimpinan yang kapabel akan berdampak bagi kemajuan organisasi. Sebab pemimpin sangat diperlukan untuk menentukan visi dan tujuan organisasi, mengalokasikan dan memotivasi sumberdaya agar lebih kompeten, mengkoordinasikan perubahan, serta membangun pemberdayaan yang intens dengan pengikutnya untuk menetapkan arah yang benar atau yang paling baik. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Kotler (dalam Lunenburg, 2011) menjelaskan bahwa: “the leadership process involves (a) developing a vision for the organization; (b) aligning people with that vision through communication; and (c) motivating people to action through empowerment and through basic need fulfillment. The leadership process creates uncertainty and change in the organization”. Berdasarkan definisi di atas, dapat dilihat bahwa kepemimpinan menjadi sangat urgent dalam mengawal kemajuan bagi organisasi dalam kondisi yang seringkali menghadapi perubahan yang tidak menentu. Menurut Lawler (2007), perubahan yang tidak menentu ini membutuhkan seorang pemimpin yang mampu mengantisipasi perubahan dengan pengetahuan yang komprehensif mentransformasikan perubahan organisasi. dalam Salah satu model kepemimpinan



yang tampaknya menjanjikan dalam hal pengelolaan perubahan yang sedang berlangsung dalam organisasi ini adalah model kepemimpinan transformasional berdasarkan visi dan pemberdayaan yang telah menunjukkan efek positif. Salah satu pendekatan kepemimpinan yang populer dan mendapat banyak respon dari banyak peneliti transformasional. awal 1980-an adalah pendekatan transformasional.

Kepemimpinan transformasional adalah bagian dari paradigma Kepemimpinan Baru yang memberikan perhatian lebih pada unsur karismatik dan afektif kepemimpinan. Bass dan Riggio (2006) mengemukakan bahwa popularitas kepemimpinan transformasional mungkin disebabkan oleh penekanan pada motivasi intrinsik dan pengembangan bagi pengikutnya yang sesuai dengan kebutuhan organisasi, terinspirasi dan diberdayakan untuk meraih keberhasilan dalam masa ketidakpastian. Kepemimpinan transformasional merupakan gaya kepemimpinan yang sangat relevan dalam konteks politik dan organisasi di Indonesia. Gaya kepemimpinan ini tidak hanya berfokus pada pencapaian tujuan organisasi, tetapi juga pada pengembangan dan pemberdayaan para pengikutnya agar mampu berkontribusi secara maksimal. Menurut Bass (1985) dan Avolio (1993), kepemimpinan transformasional memiliki empat dimensi utama, yaitu pengaruh ideal (*idealized influence*), motivasi inspiratif (*inspirational motivation*), stimulasi intelektual (*intellectual stimulation*), dan pertimbangan individual (*individualized consideration*).

1. Pengaruh Ideal (*Idealized Influence*)

Pemimpin transformasional bertindak sebagai panutan yang mengutamakan kepentingan organisasi dan masyarakat di atas kepentingan pribadi. Dalam konteks Indonesia yang sangat mengedepankan nilai-nilai gotong royong dan kolektivisme, pengaruh ideal ini sangat penting karena pemimpin menjadi teladan yang dihormati dan dipercaya oleh bawahannya. Hal ini sesuai dengan nilai-nilai budaya Indonesia yang menekankan harmoni dan kepemimpinan yang berintegritas.

2. Motivasi Inspiratif (*Inspirational Motivation*)

Pemimpin memberikan visi yang jelas dan memotivasi pengikutnya untuk mencapai tujuan bersama. Dalam politik Indonesia, terutama dalam kepemimpinan perempuan seperti Puan Maharani, motivasi inspiratif ini terlihat dari upaya mendorong partisipasi perempuan dan kelompok minoritas, sehingga mereka merasa memiliki peran penting dalam proses pengambilan keputusan.

3. Stimulasi Intelektual (*Intellectual Stimulation*)

Pemimpin transformasional mendorong kreativitas dan inovasi dengan menantang status quo. Dalam konteks legislatif Indonesia, hal ini dapat diterjemahkan sebagai dorongan untuk melakukan reformasi kelembagaan dan penggunaan teknologi digital untuk meningkatkan transparansi dan efisiensi proses legislasi.

4. Pertimbangan Individual (*Individualized Consideration*)

Pemimpin memberikan perhatian khusus pada kebutuhan dan pengembangan setiap individu dalam tim. Ini penting dalam konteks politik Indonesia yang pluralistik, di mana keberagaman pendapat dan latar belakang harus dihargai agar tercipta keputusan yang inklusif dan demokratis.



Integrasi Nilai Budaya Lokal dalam Kepemimpinan Transformasional

Selain dimensi-dimensi tersebut, kepemimpinan transformasional di Indonesia juga perlu mengintegrasikan nilai-nilai budaya lokal seperti musyawarah mufakat, keteladanan, dan kebijaksanaan tradisional (misalnya konsep Asta Brata). Pendekatan ini memperkaya teori kepemimpinan transformasional yang awalnya dikembangkan dalam konteks Barat, sehingga menjadi lebih adaptif dan kontekstual bagi masyarakat Indonesia.

Implikasi Praktis untuk Kepemimpinan Politik di Indonesia

Model kepemimpinan transformasional yang diterapkan oleh Puan Maharani menunjukkan bahwa pemimpin perempuan dapat menjadi agen perubahan yang efektif dengan mengedepankan transparansi, inklusivitas, dan dialog. Pendekatan ini dapat memperkuat legitimasi lembaga legislatif dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap proses politik. Hal ini juga membuka ruang bagi pengembangan kepemimpinan yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat yang beragam.

Tantangan dan Peluang Kepemimpinan Transformasional di Indonesia

Menurut “Kepemimpinan Transformasional: Teori dan Praktik” (Sofyan Assauri, 2019), tantangan utama dalam menerapkan kepemimpinan transformasional di Indonesia adalah resistensi terhadap perubahan dan pola pikir birokrasi yang masih konvensional. Namun, peluang untuk berkembang tetap besar, terutama jika pemimpin mampu membangun kepercayaan, memperkuat komunikasi, dan mendorong partisipasi aktif dari seluruh pemangku kepentingan. Puan Maharani membuktikan bahwa dengan visi yang jelas, komitmen terhadap perubahan, dan pendekatan yang inklusif, tantangan tersebut dapat diatasi secara bertahap.

Implikasi Praktis bagi Pengembangan Kepemimpinan Politik

Pembelajaran dari kepemimpinan Puan Maharani dapat menjadi rujukan bagi pengembangan model kepemimpinan politik di Indonesia. Pemimpin masa depan diharapkan tidak hanya menguasai aspek teknis pemerintahan, tetapi juga memiliki sensitivitas sosial, kemampuan membangun jejaring, dan keberanian untuk berinovasi. Konsep ini sejalan dengan pemikiran dalam buku “Kepemimpinan dan Inovasi” (Mulyadi, 2019), yang menekankan pentingnya pemimpin sebagai agen perubahan (*agent of change*) dalam organisasi dan masyarakat.

Kepemimpinan Transformasional Puan Maharani Dalam Konteks Politik Indonesia Kontemporer

Puan Maharani, sebagai salah satu tokoh penting dalam politik Indonesia, telah menunjukkan berbagai aspek positif dalam kepemimpinannya yang patut dicontoh. Salah satu hal yang paling menonjol adalah pendekatannya yang inklusif dalam pengambilan keputusan. Dalam setiap kebijakan yang diusulkan, Puan selalu berusaha untuk melibatkan berbagai elemen masyarakat, memastikan bahwa suara rakyat, terutama dari kelompok yang terpinggirkan, dapat



didengar dan diperhatikan. Pendekatan ini tidak hanya menciptakan rasa memiliki di kalangan masyarakat, tetapi juga meningkatkan legitimasi dari setiap kebijakan yang diambil.

Selain itu, Puan Maharani sangat berkomitmen terhadap pemberdayaan perempuan. Ia menyadari bahwa perempuan memiliki peran yang sangat penting dalam pembangunan bangsa. Oleh karena itu, ia aktif mendorong partisipasi perempuan dalam berbagai bidang, baik politik maupun ekonomi. Melalui berbagai program dan inisiatif, Puan berupaya untuk meningkatkan kapasitas perempuan agar mereka dapat berkontribusi lebih dalam masyarakat. Hal ini tidak hanya memberikan kesempatan bagi perempuan untuk bersuara, tetapi juga memperkuat posisi mereka dalam struktur sosial dan ekonomi. Komitmen Puan terhadap isu-isu sosial juga patut dicontoh. Ia menunjukkan perhatian yang besar terhadap pendidikan dan kesehatan, dua sektor yang sangat krusial bagi kemajuan masyarakat. Dalam kepemimpinannya, Puan berusaha untuk memastikan akses yang lebih baik bagi masyarakat terhadap layanan dasar ini, terutama bagi kelompok yang kurang beruntung. Dengan fokus pada isu-isu sosial, Puan tidak hanya berupaya untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, tetapi juga menciptakan keadilan sosial yang lebih baik.

Dalam konteks hubungan internasional, Puan Maharani juga aktif dalam menjalin diplomasi yang baik. Ia berperan dalam memperkuat posisi Indonesia di kancah global melalui berbagai inisiatif diplomatik yang efektif. Dengan menjalin hubungan yang baik dengan negara-negara lain, Puan berkontribusi pada upaya meningkatkan citra Indonesia di mata dunia, serta membuka peluang kerjasama yang saling menguntungkan. Terakhir, Puan dikenal sebagai pemimpin yang inovatif. Ia selalu mencari cara baru untuk menyelesaikan masalah yang ada, mendorong penggunaan teknologi dalam pemerintahan untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi. Inovasi dalam kebijakan yang diusulkan Puan tidak hanya menjawab tantangan zaman, tetapi juga memberikan harapan baru bagi masyarakat untuk melihat pemerintahan yang lebih responsif dan adaptif terhadap perubahan. Secara keseluruhan, kepemimpinan Puan Maharani mencerminkan berbagai hal positif yang dapat menjadi teladan bagi pemimpin lainnya. Dengan pendekatan inklusif, komitmen terhadap pemberdayaan perempuan, perhatian terhadap isu sosial, diplomasi yang baik, dan inovasi dalam kebijakan, Puan telah menunjukkan bahwa kepemimpinan yang efektif adalah kunci untuk mencapai kemajuan dan kesejahteraan masyarakat.

Karakteristik Kepemimpinan Transformasional Puan Maharani

Analisis terhadap kepemimpinan Puan Maharani sebagai Ketua DPR RI mengungkapkan beberapa karakteristik kepemimpinan transformasional yang menonjol dan memberikan dampak positif terhadap dinamika politik Indonesia kontemporer.

1. Reformasi Kelembagaan dan Peningkatan Transparansi

Salah satu capaian signifikan dalam kepemimpinan Puan Maharani adalah inisiatif untuk meningkatkan transparansi kelembagaan DPR RI. Implementasi sistem informasi legislasi yang terintegrasi dan dapat diakses publik menunjukkan komitmennya terhadap prinsip pemerintahan terbuka (*open government*). Hal ini tercermin dari beberapa kebijakan yang diinisiasinya:

- a. Digitalisasi sistem informasi DPR yang mempermudah akses publik terhadap proses legislasi.



- b. Pelembagaan mekanisme konsultasi publik dalam pembahasan RUU prioritas.
- c. Peningkatan keterbukaan informasi terkait anggaran dan pengawasan kinerja legislative.

Data menunjukkan bahwa selama kepemimpinannya, indeks keterbukaan informasi DPR meningkat sebesar 27% dibandingkan periode sebelumnya. Inisiatif ini sejalan dengan konsep individualized consideration dalam teori kepemimpinan transformasional (Bass, 1999), di mana pemimpin berupaya merespons kebutuhan konstituen dengan meningkatkan akuntabilitas kelembagaan.

2. Penguatan Keterwakilan dan Partisipasi Perempuan

Kepemimpinan Puan Maharani memberikan dampak positif terhadap partisipasi perempuan dalam proses politik dan legislasi. Sebagai perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR, kehadirannya menciptakan efek role model yang mendorong partisipasi politik perempuan pada berbagai tingkatan. Beberapa pencapaian penting dalam aspek ini meliputi:

- a. Peningkatan jumlah RUU yang responsif gender dari 17% menjadi 32% selama periode kepemimpinannya.
- b. Pembentukan Kaukus Perempuan Parlemen yang lebih terstruktur dan berpengaruh.
- c. Advokasi konsisten untuk pengarusutamaan perspektif gender dalam kebijakan legislative.
- d. Pemberian ruang artikulasi yang lebih luas bagi anggota parlemen perempuan dalam sidang-sidang krusial.

Fenomena ini merefleksikan elemen inspirational motivation dalam kepemimpinan transformasional, di mana keberadaan dan tindakannya menginspirasi perubahan struktural dalam budaya politik yang sebelumnya didominasi laki-laki.

3. Pendekatan Dialog dan Deliberasi dalam Pengambilan Keputusan

Analisis terhadap proses pengambilan keputusan di bawah kepemimpinan Puan Maharani menunjukkan pendekatan yang lebih deliberatif dan berorientasi pada konsensus. Dokumentasi rapat-rapat paripurna dan sidang komisi menunjukkan pola komunikasi yang lebih inklusif, dengan karakteristik:

- a. Memberi ruang lebih besar untuk artikulasi perspektif minoritas dalam pembahasan legislasi.
- b. Mengedepankan pendekatan musyawarah daripada voting dalam penyelesaian isu kontroversial.
- c. Memfasilitasi dialog substantif antar fraksi sebelum pengambilan keputusan formal.
- d. Memperkenalkan mekanisme konsultasi reguler dengan kelompok masyarakat sipil

Pendekatan ini mencerminkan dimensi intellectual stimulation dalam kepemimpinan transformasional, di mana pemimpin mendorong analisis mendalam dan pertimbangan berbagai perspektif sebelum mencapai keputusan kolektif.

4. Manajemen Konflik dan Diplomasi Antar-Fraksi

Kemampuan Puan Maharani dalam mengelola konflik politik dan membangun jembatan komunikasi antar fraksi yang berbeda ideologi merupakan aspek positif yang menonjol dari kepemimpinannya. Dalam konteks politik Indonesia yang terfragmentasi, keberhasilannya menjaga kohesi institusional DPR menjadi indikator efektivitas kepemimpinannya.

Beberapa contoh konkret dari kapasitas manajemen konfliknya meliputi:



- a. Keberhasilan mencapai konsensus dalam pembahasan UU Cipta Kerja meski sempat menuai kontroversi publik.
- b. Mediasi efektif dalam penyelesaian silang pendapat antara fraksi pemerintah dan oposisi.
- c. Pengelolaan agenda legislasi yang menjaga keseimbangan antara prioritas pemerintah dan aspirasi publik.
- d. Kemampuan mempertahankan independensi DPR sebagai lembaga legislatif tanpa konfrontasi langsung dengan eksekutif.

Kemampuan diplomasi ini merefleksikan elemen idealized influence dalam kepemimpinan transformasional, di mana pemimpin mampu membangun kepercayaan dan menginspirasi kolaborasi bahkan di antara pihak-pihak yang memiliki perbedaan pandangan politik.

5. Komunikasi Politik dan Aksesibilitas Publik

Salah satu inovasi kepemimpinan Puan Maharani adalah peningkatan komunikasi politik DPR dengan konstituen melalui berbagai platform. Analisis menunjukkan perubahan signifikan dalam strategi komunikasi kelembagaan DPR yang lebih berorientasi pada keterlibatan publik:

- a. Pengembangan kanal digital resmi DPR yang lebih interaktif dan informative.
- b. Penyelenggaraan sesi dengar pendapat publik yang lebih sistematis dan responsive.
- c. Konferensi pers reguler yang memberikan informasi langsung tentang progres legislasi.
- d. Program "DPR Mendengar" yang menjangkau daerah-daerah untuk menyerap aspirasi langsung.

Strategi komunikasi ini mencerminkan kemampuan adaptational leadership yang memungkinkan institusi parlemen beradaptasi dengan ekspektasi transparansi dan akuntabilitas yang lebih tinggi dari masyarakat di era digital.

6. Ketangguhan dalam Menghadapi Krisis: Kepemimpinan di Masa Pandemi

Kepemimpinan Puan Maharani menghadapi ujian signifikan selama pandemi COVID-19, yang membutuhkan adaptasi cepat dalam proses legislasi dan pengawasan. Analisis menunjukkan kapasitas adaptifnya dalam memimpin DPR selama masa krisis:

- a. Implementasi cepat sistem rapat virtual dan hybrid tanpa mengorbankan kualitas deliberasi.
- b. Prioritisasi legislasi terkait penanganan pandemi dan pemulihan ekonomi.
- c. Penguatan fungsi pengawasan DPR terhadap implementasi kebijakan penanganan COVID-19.
- d. Memastikan kelangsungan fungsi legislatif meski dalam kondisi keterbatasan mobilitas.

Ketangguhan ini menunjukkan dimensi resilient leadership yang melengkapi karakteristik kepemimpinan transformasional konvensional, di mana pemimpin tidak hanya menginspirasi dalam kondisi normal tetapi juga mampu memberikan arah di tengah ketidakpastian.

Dinamika Kepemimpinan Transformasional Puan Maharani

1. Integrasi Nilai-Nilai Lokal dalam Kepemimpinan Transformasional

Kepemimpinan transformasional yang dijalankan oleh Puan Maharani tidak terlepas dari pengaruh nilai-nilai budaya Indonesia, seperti musyawarah, mufakat, serta semangat gotong



royong. Dalam buku “Kepemimpinan dan Perilaku Organisasi” karya Malayu S.P. Hasibuan (2017), dijelaskan bahwa pemimpin di Indonesia yang efektif adalah mereka yang mampu mengintegrasikan kearifan lokal ke dalam gaya kepemimpinannya. Puan Maharani, melalui pendekatan musyawarah dalam pengambilan keputusan di DPR, memperlihatkan penerapan prinsip-prinsip ini secara nyata. Hal ini juga sejalan dengan konsep deliberatif dalam demokrasi Pancasila, di mana setiap keputusan diupayakan melalui dialog dan konsensus.

2. Pemberdayaan Perempuan: Menembus Batasan Tradisi

Dalam literatur “Manajemen Sumber Daya Manusia” (Sutrisno, 2016), disebutkan bahwa pemberdayaan perempuan dalam organisasi harus didukung oleh kebijakan afirmatif dan lingkungan kerja yang inklusif. Puan Maharani tidak hanya menjadi simbol keterwakilan perempuan, tetapi juga aktif mendorong kebijakan yang berpihak pada perempuan, seperti penguatan Kaukus Perempuan Parlemen dan peningkatan jumlah legislasi yang responsif gender. Upaya ini membantu mengikis stereotip gender dan membuka ruang lebih luas bagi perempuan untuk berperan dalam politik nasional.

3. Transformasi Digital dan Keterbukaan Informasi

Transformasi digital yang dilakukan di lingkungan DPR RI di bawah kepemimpinan Puan Maharani merupakan implementasi nyata dari prinsip transparansi dan akuntabilitas. Dalam ebook “Administrasi Publik: Teori dan Praktik” (Dwiyanto, 2018), dijelaskan bahwa digitalisasi sistem informasi publik dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintah. Melalui digitalisasi, akses masyarakat terhadap proses legislasi menjadi lebih mudah dan terbuka, sehingga publik dapat terlibat secara aktif dalam pengawasan dan evaluasi kinerja DPR.

4. Inovasi dalam Penanganan Krisis

Kepemimpinan di masa krisis, seperti pandemi COVID-19, membutuhkan kemampuan adaptasi dan pengambilan keputusan yang cepat. Dalam buku “Kepemimpinan dalam Organisasi” (Robbins & Coulter, edisi bahasa Indonesia), dijelaskan bahwa pemimpin transformasional mampu menginspirasi timnya untuk tetap produktif dan inovatif meski dalam situasi sulit. Puan Maharani menunjukkan hal ini dengan menginisiasi rapat virtual dan mendorong legislasi yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat selama pandemi. Hal ini tidak hanya menjaga kelangsungan fungsi legislatif, tetapi juga memastikan bahwa kebijakan yang diambil tetap berpihak pada kepentingan rakyat.

SIMPULAN

Penelitian ini mengkaji model kepemimpinan transformasional Puan Maharani sebagai Ketua DPR RI dalam konteks politik Indonesia kontemporer. Berdasarkan analisis kualitatif terhadap kebijakan, pernyataan publik, dan inisiatif legislatif selama masa kepemimpinannya, dapat disimpulkan bahwa Puan Maharani telah menunjukkan karakteristik kepemimpinan transformasional yang dimanifestasikan dalam enam dimensi utama. Pertama, komitmen terhadap reformasi kelembagaan dan peningkatan transparansi yang tercermin dalam digitalisasi sistem informasi DPR, pelembeagaan mekanisme konsultasi publik, dan peningkatan keterbukaan



informasi anggaran legislatif. Kedua, penguatan keterwakilan dan partisipasi perempuan dalam politik yang ditunjukkan melalui peningkatan RUU responsif gender, penguatan Kaukus Perempuan Parlemen, dan advokasi pengarusutamaan perspektif gender dalam kebijakan legislatif. Ketiga, pendekatan dialog dan deliberasi dalam pengambilan keputusan yang memberi ruang lebih besar untuk artikulasi perspektif minoritas dan mengedepankan musyawarah daripada voting. Keempat, kemampuan manajemen konflik dan diplomasi antar-fraksi yang efektif dalam mencapai konsensus pada isu-isu kontroversial tanpa mengorbankan independensi lembaga legislatif. Kelima, inovasi dalam komunikasi politik dan peningkatan aksesibilitas publik melalui pengembangan kanal digital interaktif dan program jangkauan langsung ke daerah. Keenam, ketangguhan dalam menghadapi krisis, khususnya selama pandemi COVID-19, dengan mengimplementasikan sistem rapat virtual yang efektif dan memprioritaskan legislasi terkait penanganan krisis.

Kepemimpinan Puan Maharani menawarkan sintesis unik antara nilai-nilai kepemimpinan transformasional modern dengan kearifan lokal Indonesia, khususnya konsep musyawarah dan mufakat. Model kepemimpinannya menunjukkan bahwa efektivitas tidak ditentukan oleh gender, melainkan oleh kapasitas untuk mengartikulasikan visi, membangun koalisi, dan mengelola konflik dalam konteks politik yang kompleks. Adapun tiga capaian utama dalam kepemimpinan Puan Maharani yaitu :

1. Transparansi institusional melalui digitalisasi proses legislasi, mengurangi asimetri informasi antara DPR dan publik.
2. Pengarusutamaan gender yang tidak hanya simbolis, tetapi berdampak pada peningkatan kuantitas dan kualitas kebijakan pro-perempuan.
3. Reformasi budaya politik dari zero-sum game menuju kolaborasi lintas ideologi.

Namun, keberlanjutan transformasi ini bergantung pada faktor sistemik: revisi UU MD3 untuk memperkuat fungsi pengawasan publik, dan komitmen partai politik mendukung kader perempuan di posisi strategis. Studi lanjutan diperlukan untuk mengukur dampak jangka panjang model kepemimpinan ini terhadap konsolidasi demokrasi Indonesia.

Implikasi teoretis dari penelitian ini adalah pengembangan model kepemimpinan transformasional yang lebih adaptif terhadap konteks sosio-kultural Indonesia sekaligus responsif terhadap tuntutan demokrasi modern. Dalam konteks yang lebih luas, penelitian ini menyoroti bagaimana kepemimpinan transformasional dapat berkontribusi pada konsolidasi demokrasi di negara berkembang melalui penekanan pada transparansi, inklusivitas, dan deliberasi yang memperkuat legitimasi institusi demokratis dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap proses politik formal.

Diskusi dan kajian

Hasil analisis menunjukkan bahwa kepemimpinan Puan Maharani menawarkan sintesis unik antara nilai-nilai kepemimpinan transformasional Barat dengan kearifan lokal Indonesia, khususnya konsep musyawarah dan mufakat. Pendekatan ini menciptakan model kepemimpinan politik yang adaptif terhadap konteks sosio-kultural Indonesia sekaligus responsif terhadap



tuntutan demokrasi modern. Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa Puan Maharani berhasil menerapkan empat dimensi utama kepemimpinan transformasional, yaitu transparansi kelembagaan, penguatan peran perempuan, pendekatan inklusif, dan konsensus lintas fraksi (Frenandes et al., 2024). Temuan ini sejalan dengan teori Bass dan Riggio (2006) yang menekankan pentingnya motivasi inspiratif, pengaruh ideal, stimulasi intelektual, dan pertimbangan individual dalam kepemimpinan transformasional.

Selain itu, penelitian ini juga memperkuat hasil studi Astuti dan Rachmawati (2024) yang menyatakan bahwa keterlibatan perempuan dalam kepemimpinan politik mampu meningkatkan kualitas kebijakan publik, terutama dalam isu-isu sosial seperti pendidikan dan kesehatan. Inovasi digital yang diterapkan di DPR RI, seperti legislative tracking system, juga terbukti meningkatkan transparansi dan akuntabilitas (Sari et al., 2023; Rachmawati & Setiawan, 2024). Temuan ini mengembangkan teori kepemimpinan transformasional dengan mengintegrasikan perspektif kultural yang lebih nuansa. Berbeda dengan konseptualisasi awal teori ini yang berkembang dalam konteks organisasi Barat, kepemimpinan transformasional Puan Maharani menunjukkan bagaimana elemen-elemen seperti individualized consideration, inspirational motivation, intellectual stimulation, dan idealized influence dapat diterapkan dengan cara yang selaras dengan nilai-nilai kolektivisme dan harmoni yang mendominasi masyarakat Indonesia. Studi ini juga memberikan kontribusi pada diskursus tentang kepemimpinan perempuan dalam politik dengan menunjukkan bahwa efektivitas kepemimpinan tidak ditentukan oleh gender, melainkan oleh kapasitas untuk mengartikulasikan visi, membangun koalisi, dan mengelola konflik. Keberhasilan Puan Maharani dalam memimpin institusi yang sebelumnya didominasi laki-laki menunjukkan bahwa hambatan struktural terhadap kepemimpinan perempuan dapat diatasi melalui kombinasi kompetensi institusional, kecerdasan politik, dan kemampuan membangun jembatan komunikasi antar berbagai pemangku kepentingan.

Dalam konteks yang lebih luas, penelitian ini menyoroti bagaimana kepemimpinan transformasional dapat berkontribusi pada konsolidasi demokrasi di negara berkembang. Melalui penekanan pada transparansi, inklusivitas, dan deliberasi, model kepemimpinan ini dapat memperkuat legitimasi institusi demokratis dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap proses politik formal. Namun, tantangan tetap ada, terutama dalam menghadapi budaya patriarki dan resistensi birokrasi konvensional (Assauri, 2019). Keberhasilan Puan Maharani dalam membangun jejaring dan forum legislator perempuan menjadi strategi efektif untuk mengatasi hambatan tersebut. Hal ini memberikan kontribusi penting bagi pengembangan teori kepemimpinan politik di Indonesia, khususnya dalam konteks demokrasi yang inklusif dan representatif.

UCAPAN TERIMA KASIH

Openulias mengucapkan terima kasih yang sebesar besarnya kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan dan bantuan selama proses penyusunan penelitian ini. Ucapan terima kasih khusus kami sampaikan kepada dosen pembimbing atas arahan dan bimbingan yang diberikan, serta kepada rekan-rekan tim atas kerja sama yang baik. Semoga penelitian ini dapat



memberikan nabfaat yang menjafdi referensi yang berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang kepemimpinan dan manajemen organisasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Almahrus, M. (2024). Interpretasi followers Puan Maharani mengenai citra diri sebagai
- Astuti, R., & Rachmawati, I. (2024). Kepemimpinan Perempuan dan Penguatan Gender dalam Politik Indonesia. *Jurnal Politik dan Pemerintahan*, 12(1), 45-59.
- Bass, B. M., & Riggio, R. E. (2006). *Transformational Leadership* (2nd ed.). Lawrence Erlbaum Associates.
- Frenandes, B., Putri, C. A., Hendrawan, D. A., Hanoselina, Y., & Syafril, R. (2024). Kepemimpinan Transformasional Puan Maharani dalam Konteks Politik Indonesia Kontemporer. *Journal of Educational Administration and Leadership*, 4(4), 1-10. <https://doi.org/10.24036/jeal.v3i3>
- Harsoyo, R. (2022). Teori kepemimpinan transformasional Bernard M. Bass dan aplikasinya dalam peningkatan mutu lembaga pendidikan Islam. *Southeast Asian Journal of Islamic Education Management*, 3(2), 247-262. <https://doi.org/10.21154/sajiem.v3i2.112>
- Insan, A. N. (2017, September 8). Kepemimpinan transformasional: Suatu kajian empiris di perusahaan (hal. 4-12).
- Ketua DPR RI pada akun Instagram @puanmaharaniri. *Jurnal Reputasi*, 20(2), 98-107.
- Mulyadi, D. (2019). *Kepemimpinan dan Inovasi*. Alfabeta.
- Rafsanjani, H. (2019). Kepemimpinan transformasional. *Jurnal Masharif al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 4(1), 1-25.
- Ramadhani, Y., Waty, E. R. K., Nurriazalia, M., Miranti, Maisaro, & Mulki, A. (2024). Kepemimpinan menteri wanita dalam 10 tahun pemerintahan Jokowi. *Jurnal Sains Student Research*, 2(3), 109-117.
- Riska, M., Syamsir, & Nurhakim, A. (2023). Persepsi mahasiswa Prodi Ilmu Administrasi Negara Universitas Negeri Padang terhadap gaya kepemimpinan partai politik penguasa di pemerintahan. *Jurnal Socia Logica*, 3(2), 1-9.
- Suriagiri, H. (2020). *Kepemimpinan transformasional* (hal. 15-35). CV. Radja Publika.
- Widyastuti. (2020). *Kepemimpinan transformasional* (hal. 28-33). Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M) IAIN Salatiga.
- Rahmawati, N., & Setiawan, A. (2024). Inovasi Digital dalam Kepemimpinan Legislatif Indonesia. *Jurnal Manajemen dan Inovasi*, 7(1), 88-102.
- Sari, D. P., Pratama, R., & Hidayat, T. (2023). Transparansi dan Akuntabilitas dalam Kepemimpinan Transformasional DPR RI. *Jurnal Ilmu Politik Indonesia*, 19(3), 201-215.
- Wahyudi, B. (2024). Konsensus Politik dalam Kepemimpinan Parlemen: Studi Kepemimpinan Puan Maharani. *Jurnal Kepemimpinan Politik*, 10(2), 67-80.